



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11146-11156
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal (Sensus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019)

Bobi Rachman

Politeknik Bisnis Mayasari

Email: Bobirachman2209@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja modal di pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat selama periode 2015-2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015- 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengamatan terhadap data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015- 2019. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda data panel. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat. Dan secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dalam penelitian ini variabel Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah memiliki pengaruh terhadap belanja modal sebesar 94%, dan 6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dapat penulis jelaskan

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Modal.*

Abstract

This study aims to analyze the effect of regional original income, transfer income, and other legal regional income on capital expenditure in district/city regional governments in West Java province during the 2015-2019 period. The Effect of Regional Original Income, Transfer Income, Other Legitimate Regional Income both partially and jointly on Capital Expenditures in Regency/City Regional Governments in West Java Province for the 2015-2019 Period. The research method used is a descriptive analytical research method. This research was carried out by observing the financial data of the Regency/City Regional Governments in West Java Province for the 2015-2019 period. The data analysis technique used was panel data multiple regression analysis. The results of multiple regression analysis show that there are Regional Original Income, Transfer Income, Other Legal Regional Income which together have a significant effect on capital expenditure in Regencies/Cities in West Java Province. And partially Original Regional Income, Transfer Income, Other Legitimate Regional Income has a positive effect on capital expenditure. In this study, the variable Regional Original Income, Transfer Income, Other Legal Regional Income has an influence on capital expenditure of 94%, and 6% is explained by other variables that the author cannot explain. Keywords:

Keyword: *Local Own Revenue, Transfer Income, Others Legitimate Regional Income, Capital Expenditures.*

PENDAHULUAN

Alokasi sumber daya yang efisien merupakan faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat daerah. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini dengan mengelola keuangan publik secara efektif dan berinvestasi dalam proyek infrastruktur yang merangsang kegiatan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi di wilayahnya sendiri. Sementara itu, pendapatan transfer adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup pendapatan yang berasal dari sumber-sumber lain seperti retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain sebagainya. Belanja modal adalah alokasi dana untuk tujuan investasi dalam peningkatan infrastruktur, fasilitas, dan aset lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dengan tujuan mencapai keuntungan jangka panjang. Signifikansi belanja modal terletak pada kontribusinya terhadap peningkatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Realisasi belanja modal dipengaruhi secara positif oleh berbagai sumber pendapatan, antara lain variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial, Dana Alokasi Khusus, pendapatan lain yang sah, penerimaan pembiayaan, dan pendapatan transfer. Selain itu, pendapatan simultan dari Daerah Asal, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan sumber pendapatan lain yang sah dan Penerimaan Pembiayaan juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap realisasi belanja modal [1]. PAD, DAU, dan SILPA memberikan pengaruh secara parsial dan bersamaan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal. Variabel PAD dan DAU menunjukkan pengaruh yang cukup kuat terhadap belanja modal, sedangkan ekspansi ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi dana modal [2]. Dampak DAU terhadap belanja daerah sebagian terlihat, tetapi secara bersamaan, ia memberikan pengaruh yang besar terhadap belanja daerah [3].

Selain Pendapatan Asli Daerah, penting juga untuk mempertimbangkan faktor pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam perencanaan belanja modal. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dapat menjadi tambahan pendanaan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah juga dapat memberikan kontribusi penting dalam mendukung belanja modal. Dalam keseluruhan, hasil penelitian tersebut menggarisbawahi pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung belanja modal pemerintah daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendanaan dapat menjadi strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan meningkatkan pembangunan infrastruktur serta perekonomian daerah secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sensus yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Analisis kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data panel, yaitu model regresi data panel yang menggabungkan data deret waktu dan data lintas bagian. Temuan penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk mengungkap korelasi antar variabel yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan penggunaan sumber data sekunder. Data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dan disusun oleh penelitian sebelumnya atau organisasi lain dan relevan dengan masalah penelitian yang dihadapi. Data sekunder ini diperoleh melalui kajian komprehensif terhadap literatur yang relevan, sumber data, dan informasi terkait lainnya terkait data keuangan 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama lima tahun dari 2015 hingga 2019.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang disediakan oleh BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Laporan-laporan ini diambil dari situs resmi seperti <https://jabar.bps.go.id> / dan <https://tasikmalayakota.bps.go.id/>, dan dipilih berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian. Selain itu, kajian pustaka meliputi pemeriksaan dokumen resmi, laporan keuangan, peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya [4]. Populasi sasaran dalam penelitian ini sebanyak 27 Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota

Model Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal maka digunakan model regresi linear berganda (Multiple Regression Analysis) data panel dan secara umum digambarkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Dimana:

Y_t = Belanja Modal

X_{1it} = Pendapatan Asli Daerah

X_{2it} = Pendapatan Transfer

X3it = Lain-lain Pendapatan yang sah

α = Konstanta

$\beta_1\beta_2\beta_3$ = Koefisien regresi

eit = Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah dikategorikan menjadi variabel bebas dan terikat. Data tersebut bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota periode 2015-2019, serta Badan Pusat Statistik Jabar dengan durasi yang sama. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dan Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015 – 2019

Berdasarkan hasil penelitian, realisasi pendapatan asli daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 s.d 2019 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota di Jawa Barat

Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat antara tahun 2015 dan 2019 menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dengan rata-rata Kabupaten Bogor tertinggi sebesar

2.655.638.061.802 dan terendah Kabupaten Pangandaran sebesar 121.930.902,32. Keunggulan kinerja Kabupaten Bogor dalam menghasilkan pendapatan asli daerah tidak terlepas dari kemampuannya dalam memanfaatkan penerimaan dari pajak daerah, antara lain bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan desa dan kota. Stabilitasnya kondisi ekonomi di Kabupaten Bogor, ditambah dengan pertumbuhan beberapa sektor ekonomi dan perbaikan infrastruktur, berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan sektor BPHTB yang cukup signifikan. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terpadat di Indonesia menarik banyak pendatang karena letaknya yang dekat dengan Jakarta. Tingkat pertumbuhan penduduknya saat ini mencapai 2 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran relatif sedikit karena merupakan wilayah yang baru dimekarkan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang kurang optimal.

Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015–2019

Berdasarkan temuan studi tersebut, terlihat dari Gambar 2 bahwa realisasi transfer pendapatan lintas Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2015 dan 2019 dapat diamati.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota di Jawa Barat

Gambar 2. Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015 – 2019 (angka dalam milyar rupiah)

Gambar 2. menunjukkan bahwa pendapatan transfer yang dialokasikan ke kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2015 dan 2019 sangat bervariasi. Kabupaten Bandung menerima rata-rata pendapatan transfer tertinggi sebesar 3.185.485.361.096 sedangkan Kota Banjar terendah sebesar 503.909.011.760. Perbedaan ini disebabkan karena Kabupaten Bandung merupakan daerah penyangga ibu kota provinsi dengan luas wilayah 1.762,4 km² dan jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga memerlukan pendapatan transfer yang lebih tinggi. Selain itu, sektor industri kabupaten menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan dari Pasal 21/25. Sebaliknya, Kota Banjar merupakan kota yang relatif kecil yang muncul dari pemekaran Kabupaten Ciamis, dengan laju pertumbuhan penduduk yang rendah dan pendanaan yang terbatas dari DAU, DAK, dan Bagi Hasil dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Barat.

Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015–2019

Berdasarkan hasil penelitian, realisasi belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 s.d 2019 dapat dilihat dari gambar 4, sebagai berikut :



Sumber: : Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota di Jawa Barat

Gambar 3. Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015 – 2019 (angka dalam milyar rupiah)

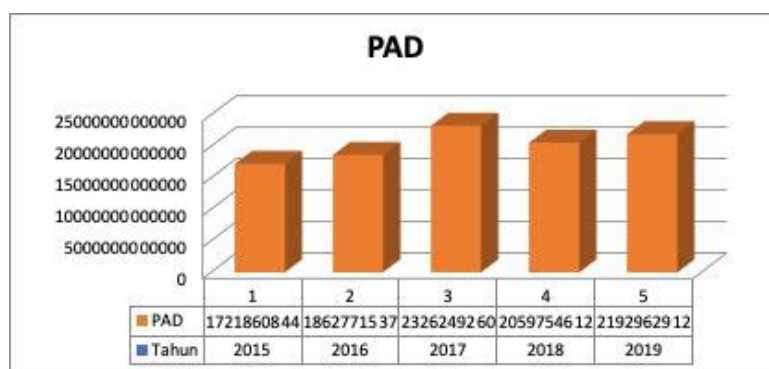
Berdasarkan Gambar 3. belanja modal Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015 – 2019 yang memiliki rata-rata tertinggi adalah Kabupaten Bogor dengan rata-rata

1.477.078.473.898 dan terendah yaitu Kota Sukabumi dengan rata-rata 184.254.170.359.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah secara Parsial terhadap Belanja Modal

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara Parsial terhadap Belanja Modal

Variabel PAD menunjukkan t-statistik yang melebihi nilai yang terdapat pada t-tabel ($1,731064 > 0,67637$) atau nilai probabilitas lebih besar dari tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ ($0,0864 > 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki hubungan positif namun tidak signifikan pengaruhnya terhadap Belanja Modal. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Berikut ini adalah rata-rata pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat per tahun.



Gambar 4. Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2019 (angka dalam milyar rupiah)

Gambar yang disajikan menampilkan data pendapatan asli daerah selama periode 2015 hingga 2019. Terlihat bahwa rata-rata pendapatan asli daerah mencapai puncaknya pada tahun 2017 dengan nilai 23.262, sedangkan rata-rata terendah terlihat pada tahun 2015, dengan nilai 17.218. Tingginya pendapatan di tahun 2017 tidak terlepas dari masuknya dana hibah dari bos ke dalam kode rekening pendapatan asli daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah saat itu. Sebaliknya, rendahnya pendapatan pada tahun 2015 disebabkan oleh belum memadainya ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak daerah di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan strategi yang berkaitan dengan penyusunan APBD atau kebijakan tentang keuangan

daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan belanja modal. Direkomendasikan agar pemerintah daerah tetap berupaya untuk meningkatkan nilai PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat menyebabkan peningkatan investasi oleh pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada hakekatnya, perluasan pendapatan asli daerah harus responsif terhadap pembangunan ekonomi [5].

2. Pengaruh Pendapatan Transfer secara Parsial terhadap Belanja Modal

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel pendapatan transfer berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan t-statistik > t-tabel ($2,569099 > 0,67637$) dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ ($0,0116 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan transfer mengakibatkan belanja modal yang lebih tinggi, yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan untuk urusan daerah dan mengutamakan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Di Propinsi Jawa Barat, rata-rata pendapatan transfer ke Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: [masukkan angka.



Gambar 5. Rata-Rata Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2019 (angka dalam milyar rupiah)

Berdasarkan diagram yang digambarkan, terlihat bahwa rata-rata pendapatan transfer tertinggi selama tahun anggaran 2015-2019 tercatat pada tahun 2019 sebesar 48.645, sedangkan terendah tercatat pada tahun 2015 sebesar 37.565. Peningkatan pendapatan transfer yang cukup mencolok tersebut tidak terlepas dari peningkatan penerimaan APBN baik dari sektor pajak maupun bagi hasil bukan pajak. Meningkatnya penerimaan transfer

pada tahun 2019 dapat dikaitkan dengan fakta bahwa pemerintah pusat telah melakukan pembayaran ke daerah atas kekurangan pembayaran dana transfer, khususnya dari bagi hasil pajak tahun-tahun sebelumnya. Patut dicatat bahwa pemerintah pusat rajin menilai laporan bulanan pendapatan dan belanja daerah, dengan tujuan utama untuk memastikan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Dalam hal belanja daerah tidak sesuai aturan, pemerintah pusat akan menahan dana transfer ke daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Pendapatan Daerah yang Sah secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal

Pengujian nilai probabilitas (F-statistic) digunakan untuk melakukan pengujian ini. Ketika nilai probabilitas (F-statistik) kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya ($\alpha = 5\%$ atau $0,05$), hipotesis nol (H_0) ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen secara kolektif mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, ketika nilai probabilitas (F-statistik) lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan ($\alpha = 5\%$ atau $0,05$), maka hipotesis nol (H_0) diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel tak bebas. Pengelolaan keuangan di suatu daerah tertentu diatur dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Daerah memperoleh pendapatan dari berbagai sumber antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain yang sah, yang kemudian digunakan untuk membiayai belanja daerah. Tujuan belanja daerah adalah untuk membangun daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Semakin banyak pendapatan yang dapat dihasilkan suatu daerah, semakin mandiri daerah itu dalam membiayai pengeluarannya. Untuk mencapai hal tersebut, masyarakat perlu menyadari tanggung jawabnya untuk berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah digunakan sebagai ukuran kualitas belanja daerah. Semakin rendah proporsi belanja pegawai dalam APBD, anggaran semakin dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih erat kaitannya dengan pelayanan publik atau yang menggerakkan perekonomian daerah, seperti belanja modal untuk fasilitas masyarakat, pembangunan jalan, dan lain-lain. dan pembangunan jembatan.

Pengukuran proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk barang dan jasa disebut belanja barang dan jasa. Belanja tersebut meliputi perolehan barang dan jasa dengan masa manfaat kurang dari satu tahun untuk memfasilitasi program dan kegiatan pemerintah daerah, antara lain pembelian barang habis pakai, perjalanan dinas, dan pemeliharaan gedung. Di sisi

lain, belanja modal digunakan untuk mengukur proporsi pengeluaran untuk aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun dan diarahkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Contoh aset tersebut termasuk tanah, bangunan, dan jalan yang diperbaiki, dengan Dana Transfer Umum (DAU&DBH) sebagai sumber utama belanja modal.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah lainnya terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. meningkatkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja modal, menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dan aset jangka panjang dalam sebuah wilayah. Transfer pendapatan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi memiliki dampak yang penting dan konstruktif terhadap belanja modal. Transfer pendapatan tersebut dapat berfungsi sebagai sumber keuangan yang substansial bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan prakarsa pengembangan infrastruktur dan aset yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- D. E. Rahmadewi, "Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Penerimaan Pembiayaan Dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, vol. 5, no. 01, pp. 108–118, 2018.
- D. Y. Permana and S. N. Rahardjo, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)," *Diponegoro Journal Of Accounting*, pp. 108–117, 2013.
- C. Salindeho, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 4, no. 3, 2016.
- S. Sugiyono, "Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D). Bandung: Alfabeta." CV, 2015.
- J. P. Saragih and M. S. Khadafi, *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Ghalia Indonesia, 2003.